

**TANTANGAN INDONESIA DALAM MERATIFIKASI
KONVENSI PENGUNGSI 1951**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

Universitas Andalas



OLEH:

FIDHIA GHINA ZANAWANA

2010851010

Dosen Pembimbing:

Anita Afriani Sinulingga, S.IP, M.Si

Maryam Jamilah, S.IP, M.Si

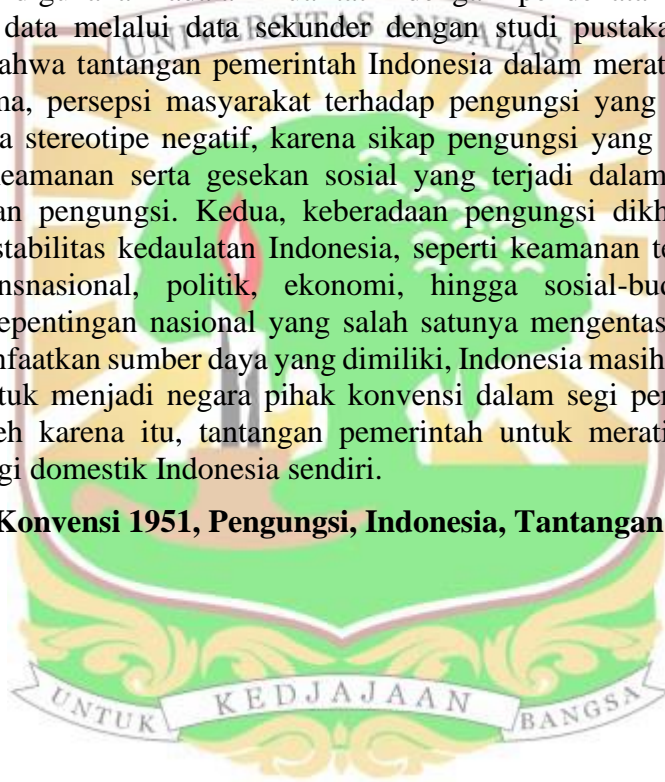
**DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2024

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951, akan tetapi tindakan pemerintah tetap memberikan perlindungan terhadap pengungsi. Berdasarkan data UNHCR per Desember 2023 lalu, jumlah pengungsi internasional di Indonesia sebanyak 12.295 jiwa, permasalahannya adalah arus pengungsi yang terus secara konsisten masuk ke wilayah Indonesia setiap tahun. Di sisi lain, dari berbagai negara non-pihak Indonesia adalah satu-satunya yang memiliki regulasi yang membahas secara spesifik dan cukup detail terkait pengungsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia untuk meratifikasi konvensi. Konsep yang digunakan adalah *the challenges of ratification* oleh Natalie Baird dengan penjelasan empat variabel yang dapat menjadi tantangan suatu negara sehingga tidak meratifikasi perjanjian. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data melalui data sekunder dengan studi pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa tantangan pemerintah Indonesia dalam meratifikasi konvensi adalah: Pertama, persepsi masyarakat terhadap pengungsi yang sebagian masih mengarah pada stereotipe negatif, karena sikap pengungsi yang terkadang dapat mengancam keamanan serta gesekan sosial yang terjadi dalam interaksi antar masyarakat dan pengungsi. Kedua, keberadaan pengungsi dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas kedaulatan Indonesia, seperti keamanan terjadinya tindak kejahatan transnasional, politik, ekonomi, hingga sosial-budaya. Terakhir, berdasarkan kepentingan nasional yang salah satunya mengentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, Indonesia masih belum memiliki kapabilitas untuk menjadi negara pihak konvensi dalam segi perekonomian dan keuangan. Oleh karena itu, tantangan pemerintah untuk meratifikasi konvensi berasal dari segi domestik Indonesia sendiri.

Kata Kunci: Konvensi 1951, Pengungsi, Indonesia, Tantangan Ratifikasi



ABSTRACT

Indonesia is one of the countries that has not ratified the 1951 Convention, but government actions still provide protection for refugees. Based on UNHCR data as of December 2023, the number of international refugees in Indonesia was 12,295 people, the problem is the flow of refugees that continues to consistently enter Indonesian territory every year. On the other hand, of the various non-party countries, Indonesia is the only one that has regulations that specifically and in sufficient detail discuss refugees. This study aims to identify the challenges faced by the Indonesian government in ratifying the convention. The concept used is the challenges of ratification by Natalie Baird with an explanation of four variables that can be a challenge for a country so that it does not ratify the agreement. The method used is qualitative with a descriptive approach and data collection through secondary data with library research. This study found that the challenges of the Indonesian government in ratifying the convention are: First, public perception of refugees, some of which still lead to negative stereotypes, because the attitudes of refugees can sometimes threaten security and social friction that occurs in interactions between the community and refugees. Second, the presence of refugees is feared to disrupt the stability of Indonesia's sovereignty, such as the security of transnational, political, economic, and socio-cultural crimes. Finally, based on national interests, one of which is eradicating poverty by utilizing existing resources, Indonesia still does not have the capability to become a party to the convention in terms of economy and finance. Therefore, the government's challenge to ratify the convention comes from Indonesia's own domestic perspective.

Keywords: *1951 Convention, Refugees, Indonesia, Challenges of Ratification*

